

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pedesaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan nasional, mengingat kawasan pedesaan yang masih dominan dan sekitar 50 persen masyarakat Indonesia masih tinggal di kawasan pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan umum dalam kawasan pedesaan, dan kepentingan umum dalam kawasan pedesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat (Pemerintah Dalam Negeri 51/2007).

Pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh satu komponen saja. Artinya, dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah desa semata, tetapi juga menuntut keterlibatan atau partisipasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat desa.

Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, memiliki 17 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa, yaitu: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dicapai dengan adanya perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan dapat dicapai

dengan adanya pembangunan, tujuan pembangunan ini adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pembangunan yang dilakukan di daerah pedesaan tidak kalah berkembang dengan pembangunan yang dilakukan di daerah perkotaan. Pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek, salah satunya dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari perempuan sebagai penggerak, membina dan membentuk keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera harus dimulai dari upaya mensejahterakan setiap keluarga.

Sutedjo dalam Gufran (2015) menjelaskan bahwa sasaran gerakan PKK adalah Keluarga di pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya dan kepribadiannya dalam bidang: mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba tuhan, anggota masyarakat dan warga Negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, Kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali dan penggerak. Pembinaan PKK kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur Dinas atau Instansi Pemerintah terkait. Tim penggerak PKK memiliki IV (empat) Kelompok Kerja atau Pokja yaitu Pokja I tugas-tugas berkaitan dengan penghayatan Pancasila dan gotong royong; Pokja II, tugas-tugasnya berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan; Pokja III, tugas-tugasnya berkaitan dengan program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga; Pokja IV, tugas-tugasnya berkaitan dengan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Lembaga pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya Lembaga PKK. Gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kegiatan PKK biasanya diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting

bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu penghayatan dan penghayatan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Lembaga PKK Desa Leguderu mencakup dalam 10 lembaga PKK. Lembaga PKK Desa Leguderu diantaranya kegiatan dalam bidang keterampilan dan produksi. Kegiatan yang dilakukan PKK Desa Leguderu sebagai bentuk pelaksanaan yang berkaitan dengan 10 pokok lembaga PKK yaitu program pangan dan sandang. Sejak berdirinya PKK di Desa Leguderu hingga sampai saat ini menjadi salah satu desa di Kecamatan Boawae yang terus melaksanakan lembaga PKK, dengan tujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis melakukan wawancara terlebih dahulu kepada salah satu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yakni Ibu Dorce Ruda (5 Januari 2022) Mengatakan bahwa di Desa Leguderu memiliki 10 kelompok organisasi PKK dengan jumlah anggota PKK desa Leguderu sebanyak 294 orang dari 1.185 jiwa. Program yang berjalan di organisasi PKK Desa Leguderu diantaranya adalah kegiatan arisan rutin PKK setiap satu bulan sekali, posyandu balita dan posyandu lansia setiap satu bulan sekali. Terdapat juga program sosialisasi dan pelatihan membuat berbagai macam olahan berbahan lokal dan membuat kerajinan tangan berupa menganyam dan menjahit.

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, dalam meningkatkan program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) masih berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan PKK itu sendiri yakni untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya tersebut belum berjalan maksimal, karena dalam pelaksanaannya antusias dari anggota PKK terhadap program yang dilaksanakan masih rendah. Selain itu pemahaman ibu-ibu dan ataupun warga terhadap pentingnya program PKK yang sebenarnya dapat lebih mensejahterakan hidupnya itu masih perlu untuk ditingkatkan. Kemudian pemahaman warga terhadap pentingnya hidup bermasyarakat dan berorganisasi yang belum maksimal juga merupakan salah satu penghambat masyarakat untuk aktif kedalam lembaga PKK.

**Tabel 1.1**  
**Data Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Jumlah Kehadiran Partisipasi Masyarakat</b>	<b>Persen (%)</b>
1	2018	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	102	34,6%
2	2019	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	80	27,2%
3	2020	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	90	30,6%
4	2021	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	65	22,1%

*Sumber: kantor desa leguderu, 2022*

Dilihat dari tahun 2018 kehadiran partisipasi masyarakat mencapai 34,6% dengan jumlah kehadiran masyarakat 102 orang, pada tahun 2019 kehadiran partisipasi masyarakat menurun ke 27,2% dengan jumlah kehadiran masyarakat sejumlah 80 orang, pada tahun 2020 kehadiran partisipasi masyarakat sedikit meningkat di angka 30,6% dengan jumlah kehadiran masyarakat mencapai 90 orang dan kehadiran partisipasi masyarakat mulai mengalami kemerosotan di awal tahun 2021 saat ini, yaitu hanya mencapai 22,1% dengan jumlah kehadiran masyarakat sejumlah 65 orang yang berpartisipasi. Peran PKK di Desa Leguderu sudah sangat rendah karena kurangnya sosialisasi mengenai PKK kepada masyarakat terutama kaum perempuan sehingga masyarakat atau kaum perempuan kurang minat mengikuti kegiatan PKK.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya kaum perempuan dengan memberdayakan melalui kegiatan PKK, maka kelompok ibu-ibu PKK Desa Leguderu, Kecamatan Boawae telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu kegiatan ekonomi yang dijalankan ibu-ibu PKK di Desa Leguderu yaitu menganyam dan menjahit. Namun dalam kegiatan ini adapun kendala atau masalah yang terjadi yakni banyaknya masyarakat atau kaum perempuan yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini karena masyarakat atau kaum perempuan merasa tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan dimana peran PKK tidak berjalan dengan baik.

Permasalahan di atas diduga karena belum optimalnya fungsi PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mewujudkan pembangunan di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo,
2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung dalam meningkatkan peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mewujudkan pembangunan di Desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung dalam peran program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang dipaparkan berdasarkan tujuan yang dikemukakan adalah:

1. Untuk Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana SI
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat terkait pentingnya program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Leguderu Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo
3. Sebagai bahan atau dokumen untuk program Studi Administrasi Publik sebagai referensi bagi peneliti lanjutan.